

## **IDENTIFIKASI POTENSI, KENDALA, DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI JAGOI BABANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Darmawan Listya Cahya, Yulius Jehky  
Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
dlcahya@yahoo.com

### **Abstrak**

Di masa lalu ada pendapat umum bahwa kawasan perbatasan merupakan sarang pemberontak, harus diamankan, terbelakang dan kurang menarik bagi investor. Hal ini mempengaruhi persepsi penanganan kawasan perbatasan, sehingga cenderung diposisikan sebagai kawasan terbelakang dan difungsikan sebagai sabuk keamanan. Akibatnya berbagai potensi sumberdaya alam kurang dikelola, terutama oleh investor swasta. Masyarakat di perbatasan umumnya miskin akibat dari akumulasi beberapa faktor, yakni rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga tertentu. Pandangan perbatasan negara sebagai 'Beranda Depan' sedikit merubah cara pandang yang baru khususnya bagi perbatasan Jagoi Babang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sekaligus memberi harapan kepada warga masyarakat yang sulit dijangkau karena keterbatasan jarak dan akses untuk tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah kita sendiri. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, dan arahan pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di perbatasan Jagoi Babang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Kemudian untuk analisisnya sendiri mengklasifikasikan data dan informasi yang diperoleh dengan berbagai teknik dan survey, wawancara, sampai dengan observasi di perbatasan Jagoi Babang secara langsung agar analisisnya lebih akurat. Implikasi dari penelitian ini adalah perbatasan Jagoi Babang bisa memberikan kontribusinya terhadap akses yang strategis untuk menunjang perekonomian pemerintah daerah secara umum dan masyarakat golongan menengah kebawah secara khusus dalam memenuhi pendapatan rumah tangga. Sehingga perbatasan Jagoi Babang ini layak untuk dijadikan sebagai magnet yang menarik banyak orang untuk dikunjungi.

**Kata Kunci :** kawasan perbatasan, beranda depan

### **Pendahuluan**

Perbatasan sebuah Negara dikenal bersamaan dengan lahirnya Negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan Negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas – batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi Negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai Negara.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki perbatasan dengan beberapa negara. Dalam konteks kontinen NKRI

berbatasan dengan tiga negara (Malaysia, PNG, Timor Leste), sedangkan dalam konteks maritim berbatasan dengan sepuluh negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan PNG).

Demikian pula negara tetangga yang berbatasan dengan NKRI, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda. Beberapa faktor seperti kondisi geografis, rendahnya kualitas SDM, dan terbatasnya infrastruktur, telah menyebabkan kawasan perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar namun menjadi daerah tertinggal.

Mengingat pentingnya kawasan perbatasan sebagai beranda negara, maka kebijakan pembangunan dalam RPJM 2010-2014 di arahkan

untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian. Tercatat bahwa 27 Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan masih terkebelakang, meliputi sarana dan prasarana fisik yang belum memadai, kesejahteraan masyarakatnya yang masih jauh dibawah standar serta ekonomi yang nyaris stagnan, sehingga menyebabkan wilayah perbatasan umumnya terisolasi.

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur). Kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Secara letak Kecamatan Jagoi Babang merupakan kawasan yang sangat strategis untuk jalur perdagangan menuju Serikin (Sarawak, Malaysia). Namun, sayangnya potensi yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, karena masih banyak kendala yang dihadapi.

Dalam rangka nasionalisme dan pemerataan pembangunan serta menjaga keutuhan dan integritas bangsa, percepatan pembangunan di kawasan perbatasan tidak bisa ditawar dan perlu direalisasikan secara sungguh-sungguh dan terprogram. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harmonis segenap jajaran baik pemerintah dan masyarakat serta pengusaha untuk menjadikan wilayah perbatasan menjadi beranda depan negara. Letak kawasan ini yang berhadapan secara langsung dengan Negara lain memang menyebabkan kawasan ini rawan terhadap intervensi dari Negara lain baik dalam aspek ekonomi, politik, sosiokultural, maupun keamanan. Di sisi lain, kawasan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka muncul suatu permasalahan yang mendasar dalam pengembangan kawasan perbatasan Jagoi Babang adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kawasan perbatasan di Jagoi Babang?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui aspek-aspek yang menjadi penghambat maupun pendorong pengembangan kawasan perbatasan antarnegara Jagoi Babang. Dengan sasaran untuk mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan kawasan perbatasan antar negara Jagoi Babang dan merumuskan konsep arahan pengembangan kawasan perbatasan Jagoi Babang.

## **Tinjauan Teori**

Wilayah perbatasan memiliki dimensi manusia dan pengalaman di dalamnya, hal tersebut menandakan dimensi penting tentang identitas komunitas yang berujung pada manajemen dan regulasi khusus masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara seharusnya lebih intensif pada kawasan perbatasan, meskipun mungkin secara geografis berada pada wilayah yang terpencil (*remote area*) dan berada di tapal batas kewenangan teritorial. Secara tradisional, perbatasan memiliki aspek dinamis dari sebuah negara, termasuk manusia dan pengalamannya, serta sebagai indikator dalam mengukur kekuatan sebuah negara (Giddens, 1985:49).

Pengertian *border* seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, *border* memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). *Border area* atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan.

Perubahan kondisi hubungan di perbatasan menyebabkan terjadinya pergerakan arus manusia antarnegara. Hal ini menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional, karena terjadinya migrasi di wilayah perbatasan disebabkan oleh motif peningkatan kesempatan ekonomi antara perusahaan dan individual. Kondisi tersebut berdampak pada perluasan jaringan sosial antara negara yang berbeda, sehingga membentuk komunitas transnasional dengan ciri etnis dan warisan budaya yang sama, namun hidup dalam negara yang berbeda (Akaha dan Vassilieva, 2005: 1).

### **A. Isu Strategis di Bidang Sosial Ekonomi Kawasan Perbatasan**

- a. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga dan Wilayah sekitarnya.
- b. Sarana dan prasarana yang masih minim.
- c. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera.
- d. Terisolirnya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan.
- e. Rendahnya kualitas SDM.
- f. Belum dikelolanya SDA wilayah perbatasan secara optimal.

## **B. Konsepsi Pembangunan Daerah Perbatasan**

Konsepsi pembangunan daerah perbatasan diarahkan untuk :

- a. Membuka.
- b. Mengembangkan.
- c. Mempercepat.
- d. Menyeraskan.
- e. Menciptakan daya tarik.

Menganut “Teori Laron” karena laron akan berbondong-bondong berkumpul menuju cahaya ditengah kegelapan, dengan menciptakan “cahaya” agar mendorong dan tercipta daya tarik yang dapat menggerakkan minat dan daya dorong masyarakat dan pelaku usaha untuk berbondong bondong ke wilayah perbatasan.

## **C. Strategi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan**

1. Identifikasi Potensi.
2. Pengelompokan dan Zonanisasi Potensi serta distribusinya :
  - a. Zona Pengembangan Ekonomi Masyarakat 30 %.
  - b. Zona Pengembangan Ekonomi BUMD/BUMN 20 %.
  - c. Zona Pengembangan Ekonomi Investasi 50 %.
3. Studi dan Kajian Potensi.
4. Pembuatan Proposal Investasi dan FS masing Masing Potensi.
5. Pemasaran dan Penggalangan Investor Potensial.
6. Beauty Contest pemilihan dan Penetapan Investor.
7. Eksekusi dan pelaksanaan Investasi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

Sementara hipotesis dalam kasus ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang menghambat perkembangan perbatasan Jagoi Babang, karena sampai saat ini semenjak dibukanya border PLB oleh pemerintah, sama sekali belum ada suatu pembangunan yang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, untuk menguji hipotesis ini dilakukan pengumpulan data-data yaitu data primer dan sekunder.

Pendekatan Teori merupakan pendekatan secara studi literatur berupa kajian-kajian teori terkait dari berbagai sumber, mengenai permasalahan perbatasan diberbagai negara belahan dunia maupun dalam wilayah nasional yang kerap terjadi sengketa. Langkah ini untuk mendukung penelitian mengenai perbatasan sehingga penulis mempunyai dasar pada saat melakukan penelitian. Tinjauan Kebijakan merupakan Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditinjau mulai dari dalam lingkup wilayah Nasional, dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkayang sebagai ibukota wilayah studi penelitian. Observasi lapangan adalah dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada, terkait dengan keberadaannya sebagai pintu perbatasan Negara.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan atau responden (*participan observation*), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan untuk keperluan analisis pada studi ini dapat digolongkan kepada dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan penerapan metode wawancara kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah daerah terkait yang berwenang dalam proses perencanaan kawasan perbatasan Jagoi Babang. Adapun data sekunder mencakup catatan-catatan, hasil-hasil studi, hasil-hasil dokumentasi berupa foto, peraturan-peraturan, serta dokumen kebijakan dari instansi-instansi terkait.

Di samping itu, data sekunder ini mencakup juga hasil pengkajian literatur, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional. Adapun lingkup dari data sekunder ini mencakup data sosial kependudukan, ekonomi, fisik, profil perkotaan di wilayah studi. Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu survey instansional serta pengamatan lapangan. Survey instansional dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder, baik data-data numerik maupun

data-data (dokumen) kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kawasan perbatasan. Pengamatan lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang (*cross-check*) data sekunder dengan fakta-fakta yang terjadi. Kegiatan terutama difokuskan untuk mengetahui sejauh mana proses kebijakan perencanaan itu di terapkan, kemudian dirasakan oleh masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan perbatasan Jagoi Babang.

### **Analisis Deskriptif**

Dalam hal ini, deskriptif analisis akan lebih difokuskan kepada analisis kondisi eksisting kawasan perbatasan Jagoi Babang berupa fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan metode deskriptif analisis tersebut, berikut ini adalah hasil pengamatan yang telah dihimpun selama observasi dilakukan :

#### **Data Primer**

- a. Observasi, observasi lapangan guna mendapatkan fakta dari kenyataan wilayah perbatasan Jagoi Babang, melalui pengamatan yang terlihat kondisi perbatasan Jagoi Babang pada saat sekarang bisa dikatakan belum mampu untuk berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai Pos Lintas Batas (PLB), hal tersebut bisa terlihat dari pembangunan yang belum siap untuk melayani sepenuhnya aktivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh warga yang setiap hari melakukan perjalanan keluar/masuk ke wilayah Negara tetangga (Malaysia), atau warga dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia.
- b. Kegiatan wawancara dilakukan pada responden pemerintah terkait maupun masyarakat dengan alasan perspektif kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional dengan dimensi yang kompleks menunjukkan peran pemerintah yang masih mendominasi perkembangan wilayah perbatasan Jagoi Babang.

### **Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan ini mencakup tujuan kebijakan, hasil kebijakan, serta dampak kebijakan yang mungkin terjadi. Dalam metode analisisnya, data yang dianalisis berupa data sekunder. Berikut ini adalah pengelompokan data tersebut.

#### **Data Sekunder**

- a. Dokumen kebijakan terkait, hasil observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan kebijakan. Tinjauan kebijakan berupa RTRW terbaru dari Instansi

Bappeda Kab. Bengkayang, yang didalamnya telah terdapat kebijakan yang mengatur perbatasan Jagoi Babang mulai dari skala Nasional sampai tingkat Kabupaten.

- b. Dokumentasi berupa foto, maksud yang ingin peneliti ungkapkan adalah biasanya fakta didalam teori berbeda dengan yang terjadi dilapangan. Bisa saja pihak pengelola kawasan perbatasan mengatakan perbatasan Jagoi Babang sudah membaik kepada masyarakat luas, tapi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat banyak aktivitas yang belum dilakukan kontrol secara total. Maka dari itu, peneliti rasanya bersalah jika menutupi fakta yang sebenarnya terjadi pada wilayah perbatasan Jagoi Babang kedalam dokumentasi berupa foto.

### **Analisis Kelembagaan**

Analisis ini difokuskan untuk menganalisis lembaga-lembaga yang terkait dalam kewenangan mengelola kawasan perbatasan Jagoi Babang. Dari hasil pantauan peneliti di lapangan, berikut adalah kelembagaan yang terlihat beroperasi dan yang belum beroperasi sama sekali :

#### **a. Desa Informasi**

Desa informasi bertujuan untuk memberikan berbagai informasi secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan maupun di pelosok-pelosok yang sulit mendapatkan informasi, karena selama ini masyarakat selalu menikmati informasi dari negeri seberang (Malaysia). Oleh sebab itu, program desa informasi ini di harapkan sebagai sarana penyambung komunikasi yang bisa diakses oleh masyarakat diperbatasan mengenai informasi yang berkembang, tidak lain agar menjadikan masyarakat pintar.

#### **b. Pos Imigrasi**

Pos ini terpantau cukup ada kegiatan, karena harus siap melayani masyarakat yang ingin membuat dan perpanjang PLB, serta stempel PLB bagi setiap warga yang melakukan perjalanan keluar/masuk ke wilayah Malaysia.

#### **c. Pos Bea dan Cukai**

Aktivitas yang terlihat di pos tersebut, tidak ada kesibukan sama sekali seperti halnya pos bea dan cukai pada umumnya. Hanya ada beberapa orang petugas yang duduk-duduk sambil cerita dengan petugas lain. Pada saat peneliti mencoba mendatangi dan bertanya untuk memperoleh sedikit informasi mengenai tugas-tugas yang mereka lakukan dalam menangani berbagai arus barang yang keluar/masuk, beberapa petugas diantaranya

mengatakan bahwa untuk masalah peredaran barang tidak terlalu dikontrol secara menyeluruh, belum diketahui secara pasti kenapa penyebabnya, sementara untuk masalah data-data yang masuk kedalam arsip juga belum ada (nihil) dengan alasan tidak ada yang menginput data tersebut. Mengingat kerawanan perbatasan yang sering marak terjadi penyelundupan barang illegal, sudah saatnya lah pos ini bertindak sebagaimana tugas dan fungsinya.

d. Pos Karantina Pertanian dan Pos Pemeriksaan Pengawas Perikanan

Sesuai dengan namanya, pos tersebut sangat vital berada di wilayah perbatasan karena tugasnya mengontrol setiap barang yang boleh dibawa dan tidak diperbolehkan. Tentunya pihak pemerintah kita tidak ingin kecolongan saat belum berfungsinya kedua pos tersebut sampai dengan saat ini.

e. Pos Terpadu

Pos ini juga sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda adanya aktivitas berarti, terlihat hanyalah bangunan kosong tanpa petugas yang berjaga.

Dalam analisis kelembagaan ini, peneliti hanya ingin menekankan kepada instansi terkait beserta jajarannya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan perangkat wilayah studi untuk mulai membenahi diri, agar tercipta saling kerja sama dan berkoordinasi secara menyeluruh antarinstansi yang mengelola perbatasan Jagoi Babang. Sehingga mampu bersaing dengan perbatasan tetangga yaitu Malaysia yang semakin kian pesat perkembangan daerah perbatasannya.

### **Gambaran Umum Kawasan Perbatasan**

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara bagian Serawak Malaysia, dengan panjang garis perbatasan di darat adalah 966 kilometer. Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menjadi acuan bagi penarikan garis batas laut teritorial, yaitu TD. 035 di Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perbatasan darat di Kalimantan Barat melintasi 116 desa dalam 15 kecamatan dan di 5 kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Sambas, memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu : (1) Paloh; dan (2) Sajingan Besar.
2. Kabupaten Bengkayang, memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu : (1) **Jagoi Babang**; dan (2) Siding.

3. Kabupaten Sanggau, memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu : (1) Entikong; dan (2) Sekayam.
4. Kabupaten Sintang, memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu : (1) Ketungau Hulu; dan (2) Ketungau Tengah.
5. Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki 7 kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu : (1) Putussibau Utara; (2) Semitau; (3) Puring Kencana; (4) Empanang; (5) Badau; (6) Batang Lupar; dan (7) Embaloh Hulu.

Kabupaten Bengkayang memiliki 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding meliputi 23% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang. Kecamatan Jagoi Babang memiliki luasan 655 km<sup>2</sup> atau 12%, dan Kecamatan Siding 563,3 km<sup>2</sup> atau 10%.

Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang terletak paling utara Kabupaten Bengkayang dibentuk pada tahun 1999. Secara geografis Kecamatan Jagoi Babang terletak di 1<sup>0</sup>15'16'' Lintang Utara sampai 1<sup>0</sup>30'00'' dan 109<sup>0</sup>34'35'' Bujur Timur dan 109<sup>0</sup>59'27'' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Jagoi Babang adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak/Malaysia Timur.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluas.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Siding.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sambas.

### **Identifikasi Potensi Pengembangan**

Pengertian potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada disekitar kita. (Kartasapoetra, 1987 : 56).

Potensi yang dimaksud penulis disini adalah potensi yang belum digali sama sekali oleh pihak terkait, untuk itu penulis mencoba mengidentifikasi potensi-potensi tersebut yang berpengaruh positif untuk kemajuan dan perkembangan Kec. Jagoi Babang dimasa yang akan datang mengingat letaknya yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

### Potensi Bahan Tambang dan Galian

Berdasarkan sumber dari Kecamatan Jagoi Babang Dalam Angka Tahun 2011, terdapat potensi yang begitu besar tersimpan di Kecamatan Jagoi Babang yaitu berupa air raksa dan granit, bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Potensi Bahan Galian Di Kecamatan Jagoi Babang

Jenis Mineral	Lokasi	Cadangan	Pengusahaan
Air Raksa (Hg)	Kec. Jagoi Babang (Bukit Jagoi)	Indikasi	Belum
Granit	Ke. Jagoi (Desa Jagoi)	1.600.000 Ton	Belum

Sumber : Kec. Jagoi Babang Dalam Angka Tahun 2011

Kegunaan granit sebagai bahan bangunan rumah dan gedung, untuk bangunan monumen, jalan, dan jembatan, sebagai batu hias (dekorasi) sebagai bahan baku industri poles (tegel, ornamen, dll) dan bahan bangunan (gedung, jalan, jembatan, dll).

### Potensi Jasa Angkutan Penumpang Antar negara (Bus Damri)

Potensi jasa angkutan penumpang berupa bus damri ini bertujuan untuk memudahkan mobiltas warga pada saat akan mengunjungi Kuching untuk berobat atau sekedar berjalan-jalan begitu pula sebaliknya bagi wisatawan mancanegara. Selama ini masyarakat Kalimantan Barat hanya mempunyai dua pilihan yaitu melalui jalur darat PPLB Entikong dan Bandara Supadio Pontianak. Jadi, diharapkan PLB Jagoi Babang juga mampu memenuhi pelayanan jasa penumpang tersebut. Mengenai perbandingan PPLB Entikong dan PLB Jagoi Babang bisa dilihat pada tabel 2.

Dilihat dari jaraknya PLB Jagoi Babang cukup dekat dengan Ibukota Pontianak yaitu 261 km dibandingkan Ibukota Pontianak – Entikong berjarak 310 km. Sedangkan untuk waktu tempuhnya sendiri Pontianak – Entikong 7-8 jam perjalanan kurang lebih sama Pontianak – Jagoi Babang, dikarenakan kondisi infrastruktur jalan untuk saat ini masih belum mulus jika dilalui kendaraan besar, untuk itu perlu mendapat perhatian juga oleh pemerintah terkait.

Mengenai rencana pengembangan transportasi Bus Damri sendiri, penulis merencanakan Bus Damri tersebut tidak melalui Kota Pontianak, mengingat ada dua pilihan alternatif yang telah disediakan pemerintah yaitu jalur darat dari Pontianak menuju ke PPLB

Entikong serta jalur udara melalui Bandar Udara Supadio menuju Kuching. Untuk itu penulis melihat adanya potensi yang dimiliki oleh kota kedua terbesar di Kalimantan Barat yakni Kota Singkawang, kota yang dijuluki dengan ‘Hongkongnya Indonesia’ saat ini perkembangannya kian pesat baik dari sektor Kepariwisataaan, Perdagangan, sampai dengan Kultur Budaya karena terdapat tiga suku besar didalamnya yaitu : Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Sementara Kuching sendiri dimata masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya adalah Kota yang menjadi tempat untuk berobat dikarenakan fasilitas Rumah Sakitnya cukup lengkap, selain untuk bekerja ataupun sekedar berwisata. Dengan adanya daya tarik yang dimiliki masing-masing kota tersebut, tentu akan berdampak positif khususnya bagi jalur PLB Jagoi Babang yang dilewati.

Tabel 2

Perbandingan Jarak, Rute, Waktu Tempuh, dan Kondisi Jalan dari Pontianak – PPLB Entikong dan Rencana dari Singkawang – PLB Jagoi Babang

Pos Perbatasan	Dari Pontianak			
	Jarak	Rute	Waktu Tempuh	Kondisi Jalan
PPLB Entikong	310 Km	Melalui jalan trans Kalimantan poros selatan sampai kecamatan Tayan kemudian melintas ke Utara melewati kecamatan Batang Tarang, Sosok, Kembayan dan akhirnya masuk ke Entikong.	± 8 Jam	Cukup baik
Rencana Dari Singkawang				
PLB Jagoi Babang	233 Km	Singkawang – Bengkayang – PLB Jagoi Babang – Kuching	± 6 Jam	Beberapa masih dalam proses pengerjaan khususnya memasuki perbatasan

Sumber : Hasil Analisis

Bus Damri rencananya akan melayani rute Singkawang – Bengkayang – PLB Jagoi Babang – Kuching dengan total jarak adalah 233 Km, dimana jarak antara Singkawang – PLB Jagoi Babang 180 Km dan PLB Jagoi Babang – Kuching 53 Km. Dengan berbagai asumsi pendukung tersebut, penulis berkeyakinan jika rencana ini terealisasi

dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian daerah.

### **Identifikasi Kendala Pengembangan**

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pembangunan daerah perbatasan antarnegara Jagoi Babang ini antara lain:

#### **Penyebaran Penduduk Tidak Merata**

Ditunjukkan antara lain oleh rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang, yang berimplikasi pada kegiatan pelintas batas yang ilegal. Selain itu banyaknya TKI yang bekerja di negara tetangga sebagai pekerja kasar seperti buruh perkebunan, bangunan, dan pembantu rumah tangga, juga turut menurunkan harkat bangsa, dimana Negara dinilai belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan rakyatnya.

#### **Petugas Pos Perbatasan**

Kurangnya keahlian yang dibekali kepada para petugas yang ditempatkan pada pos-pos terkait menyebabkan kinerja mereka menjadi terhambat. Berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda bukanlah sesuatu kendala apabila perekrutannya memenuhi standar dan aturan yang jelas. Dengan penyediaan fasilitas yang kurang mencukupi fungsi pelayanan kepada masyarakat setempat relatif kurang memadai.

#### **Perdagangan Ilegal**

Mengenai produk impor asal Malaysia, penulis telah mendapatkan sedikit informasi tambahan dari berbagai narasumber mengenai perbandingan harga produk impor Malaysia dengan produk dalam Negeri, berikut tabel perbandingan harga-harganya :

**Tabel 3**  
**Perbandingan Harga Impor Malaysia**

<b>Keterangan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Impor</b>	<b>Harga Lokal</b>
Gula	Kg	Rp. 8.400,-	Rp. 12.000,-
Milo	Kg	Rp. 35.000,-	Rp. 55.000,-
Tabung Gas	14 Kg	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-
Minyak Goreng	Kg	Rp. 10.500,-	Rp. 10.400,-
Minuman Kaleng (Soya)	Lusin	Rp. 33.000,-	Rp. 40.000,-

*Catatan : Harga impor telah dalam satuan Rupiah (IDR) dengan Kurs Rp. 3.000,-/ 1 RM*

#### **Human Trafficking (Perdagangan Wanita dan Anak)**

Tidak dipungkiri lagi sudah sangat akrabnya masyarakat kita dengan produk asal negeri jiran Malaysia itu, bahkan mereka juga tidak peduli produk-produk tersebut memiliki izin atau tidak. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang aturan impor lima produk barang tertentu, produk Malaysia maupun produk impor lainnya hanya boleh melalui lima pelabuhan besar di Indonesia. Yaitu Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makasar.

Segera perketat peraturan mengenai produk-produk impor yang bebas masuk melalui pintu perbatasan Jagoi Babang, karena jika dibiarkan terus-menerus praktek ilegal tersebut akan menghilangkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri sendiri.

#### **Kebebasan Keluar/Masuk Warga Malaysia Melalui Perbatasan**

Pintu perbatasan yang kurang memperketat dalam pemeriksaan bagi keluar/masuknya manusia merupakan jalan surga bagi para oknum Human Trafficking dalam bertransaksi dengan modus mencari para TKW agar bekerja di Malaysia. diiming-imingi pekerjaan yang layak serta gaji tinggi menyebabkan para TKW menjadi mudah dirayu untuk berangkat ke Malaysia tanpa berfikir panjang. Berbagai macam tuntutan baik dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu adalah alasan yang selalu terlintas dibenak para TKW tersebut. Padahal belum tentu pekerjaan yang akan mereka dapatkan sesuai dengan janji-janji para oknum yang membawanya.

Perdagangan Anak dan Wanita atau biasa disebut Trafficking adalah perbuatan melanggar HAM sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

**Tabel 4**  
**Matriks Perumusan Konsepsi Penanganan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Jagoi Babang**

No	Isu dan Permasalahan	Tantangan	Kendala	Peluang	Strategi	Konsepsi Penanganan
I.	<b>Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar Mampu Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan perbatasan menjadi pemicu tingginya pelintas batas untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.</li> <li>◆ Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat.</li> <li>◆ Tidak tercipta keterkaitan antar kluster sosial ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perbatasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang dapat sinkron dengan kegiatan ekonomi wilayah sekitarnya.</li> <li>◆ Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai.</li> <li>◆ Mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata.</li> <li>◆ Banyaknya TKI yang bekerja di negara tetangga sebagai pekerja kasar.</li> <li>◆ Keterbatasan sumber pendanaan akibat kurangnya prioritas pembangunan daerah perbatasan.</li> <li>◆ Tingkat kesenjangan antardaerah yang semakin melebar.</li> <li>◆ Keterbatasan kelembagaan dan aparat di daerah perbatasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kekakayaan sumberdaya alam yang dimiliki sangat potensial untuk dikembangkan dan menjadi modal dasar percepatan pembangunan daerah.</li> <li>◆ Menjadi penggerak kegiatan ekonomi wilayah karena fungsinya sebagai outlet menuju negara tetangga.</li> <li>◆ Menciptakan keterkaitan fungsional secara ekonomis yang lebih luas antara negara tetangga dengan wilayah tanah air lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penanggulangan kemiskinan yang dicapai melalui pemenuhan kebutuhan mendesak dan redistribusi manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor-sektor produksi seperti pertambangan dan kehutanan antara lain melalui HPH Bina Desa.</li> <li>◆ Pengembangan kegiatan ekonomi setempat yang didasarkan pada potensi sumber daya alam yang prospektif dikembangkan.</li> <li>◆ Peningkatan perdagangan lintas batas (kegiatan ekspor dan impor) melalui jalur darat maupun laut secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.</li> <li>◆ Pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan peranserta pihak swasta.</li> <li>◆ Peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Menciptakan keterkaitan fungsional antar kluster sosial ekonomi (kluster penduduk setempat dan kluster binaan pengelolaan sumberdaya alam) sehingga terwujud pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang sinkron antar wilayah berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah setempat, serta dengan mengoptimalkan peran sebagai outlet menuju negara tetangga.</li> <li>◆ Meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta membuka keterisolasian kawasan secara komprehensif dilandasi dengan pengaturan sistem produksi, sistem pemasaran dan sistem pelayanan jasa (kota desa).</li> <li>◆ Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan) yang merata antar wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang memadai dengan mempertahankan nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap penetrasi budaya asing.</li> <li>◆ Menciptakan peluang dan promosi investasi pembangunan kawasan didukung komitmen kelembagaan dan pendanaan yang memadai berdasarkan kekakayaan</li> </ul>

No	Isu dan Permasalahan	Tantangan	Kendala	Peluang	Strategi	Konsep Penanganan
					partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah perbatasan.	sumberdaya alam setempat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.
<b>II. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Wilayah Potensi yang Ada</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam yang merugikan (contoh: kasus illegal logging).</li> <li>◆ Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerjasama bilateral antar kedua negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kebutuhan jalan penghubung, landasan pacu (airstrip), dan sarana komunikasi serta sarana perhubungan yang memadai.</li> <li>◆ Pengisian dan pemerataan penduduk untuk keperluan sistem Hankamrata termasuk kekuatan cadangannya melalui kegiatan transmigrasi dan permukiman kembali (resettlement) penduduk setempat.</li> <li>◆ Kebutuhan survei dan pemetaan sumberdaya alam guna menunjang pembangunan dan sebagai obyek yang dilindungi pelestarian dan keamanannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah masih sangat terbatas (sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pasar).</li> <li>◆ Terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) dan sumberdaya alam lainnya (contoh: konflik kawasan budidaya dengan kawasan lindung, konflik antara kegiatan pertambangan dan kehutanan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sebagai outlet yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memungkinkan hubungan lang-sung dengan pasar potensial yang dapat dimanfaatkan oleh produsen internal di daerah masing – masing maupun secara nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penetapan sistem perhubungan yang dapat mendukung pola produksi dan perubahan orientasi dari subsisten kepada pasar.</li> <li>◆ Peningkatan pemba-ngunan prasarana transportasi dalam rangka membuka isolasi daerah, serta pengembangan potensi wilayah.</li> <li>◆ Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat permukiman potensial yang tetap berorientasi pada sistem atau pola pengembangan wilayah propinsi.</li> <li>◆ Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Meningkatkan koordinasi antar pelaku pengelolaan sumberdaya alam, pengisian dan pemerataan penduduk, sarana prasarana wilayah (perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pasar) dalam rangka meminimasi konflik sektoral (pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam), serta optimalisasi peran outlet untuk menjalin hubungan dengan pasar potensial baik bagi produsen internal (setempat) maupun nasional.</li> <li>◆ Menjalin kerjasama bilateral antar kedua negara dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan bidang ekonomi lainnya.</li> <li>◆ Membangun basis data pembangunan yang memadai melalui survei dan pemetaan sumberdaya alam mendukung peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah.</li> </ul>
<b>III. Memantapkan Keamanan dalam rangka Pembinaan serta Peningkatan Ketahanan Wilayah Menuju Terciptanya Ketahanan Nasional</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Posisi strategis yang rawan di bidang hankam dan politis karena kurangnya pos lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemahaman sistem politik nasional.</li> <li>◆ Terselenggaranya aparat pemerintah yang berkualitas sebagai mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Belum adanya penegasan status daerah perbatasan (wilayah kecamatan).</li> <li>◆ Belum adanya persetujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Barometer keberhasilan pembangunan nasional, termasuk pertahanan keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan penataan lingkungan permukiman yang dilakukan secara terpadu dengan program penataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Merumuskan konsep dan kesepakatan untuk penyelesaian masalah perbatasan terkait dengan aspek hankam dan politis antara lain: penetapan garis perbatasan negara,</li> </ul>

No	Isu dan Permasalahan	Tantangan	Kendala	Peluang	Strategi	Konsepsi Penanganan
	<p>batas legal yang disepakati.</p> <p>♦ Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok batas (kehilangan wilayah negara).</p> <p>♦ Kepastian hukum suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan masih lemah.</p> <p>♦ Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek keamanan dan politis, maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam yang lintas batas negara, baik sumberdaya alam darat maupun laut.</p>	<p>aparatus hankam dalam pembinaan teritorial setempat.</p> <p>♦ Kebutuhan pembangunan pos-pos perbatasan, pembentukan sabuk pengamanan (security belt), dan pembentukan pembinaan teritorial yang memadai.</p>	<p>kegiatan lintas batas kedua negara yang berkaitan dengan larangan untuk mengelola dan mengembangkan kawasan penyangga sepanjang garis perbatasan.</p>	<p>wilayah yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.</p>	<p>kembali wilayah administratif (desa, kecamatan, dan kabupaten).</p> <p>♦ Peningkatan pelayanan telekomunikasi seperti penambahan dan peningkatan daya pancar relay TVRI dan RRI.</p> <p>♦ Pengembangan sistem informasi dan komunikasi baik oleh pemerintah maupun swasta dalam menumbuhkan dan meningkatkan rasa di perbatasan.</p>	<p>pembangunan pos lintas batas legal, eksploitasi sumberdaya alam (darat dan laut) yang memanfaatkan kawasan penyangga dan pembentukan sabuk pengamanan (security belt).</p> <p>♦ Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam operasionalisasi pembangunan wilayah perbatasan sebagai barometer keberhasilan dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.</p> <p>♦ Melakukan sosialisasi sistem politik nasional dalam berbagai media dan mendorong tersedianya mitra aparat hankam dalam pembinaan teritorial setempat.</p> <p>♦ Membangun rasa kebangsaan masyarakat dengan cara penyampaian informasi melalui berbagai media masa (TVRI, RRI, Internet, dan lainnya).</p>

melainkan perbatasan darat sebagai Beranda Depan Negara RI.

### **Kebebasan Keluar/Masuk Warga Malaysia Melalui Perbatasan**

Lemahnya aturan dan kurangnya pemeriksaan bagi warga Malaysia yang hendak berpergian ke wilayah Indonesia adalah faktor buruk lainnya yang menggambarkan perbatasan Jagoi Babang selalu dipandang sebelah mata. Berbeda dengan perlakuan

Untuk itu penulis mengangkat permasalahan Perdagangan Wanita dan Anak ini menjadi kendala bagi perkembangan perbatasan Jagoi Babang secara khusus, maupun perbatasan-perbatasan lainnya mengingat saat ini Human Trafficking selalu marak terjadi pada pintu perbatasan yang rawan kontrol dari petugas. Penulis tetap mengupayakan supaya arah pembangunan saat ini tidak lagi condong kedaerah-daerah pusat

aparatus Malaysia terhadap warga kita pada saat akan memasuki wilayahnya, jika kurang lengkap identitas tidak diperbolehkan masuk terlalu jauh, dan jika diabaikan akan ditangkap.

### **Perencanaan Yang Kurang Matang**

Seperti itulah kenyataan yang terlihat pada saat memasuki perbatasan Jagoi Babang terdapat pos-pos yang telah ada cukup lama berdiri namun masih kosong tanpa ada aktivitas berarti. Bisa dikatakan pemerintah belum matang dalam merencanakan kawasan perbatasan Jagoi Babang tersebut, bisa dibayangkan berapa dana yang sudah dikeluarkan jika pembangunannya terbengkalai seperti itu.

### **Arahan Pengembangan**

Dengan melihat hasil dari identifikasi potensi dan kendala pengembangan perbatasan Jagoi Babang tersebut, peneliti ingin memberikan suatu arahan pengembangan berdasarkan identifikasi yang peneliti lakukan, semoga studi ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan perbatasan Jagoi Babang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi potensi dan kendala pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di perbatasan Jagoi Babang, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Percepat segera pembangunan pintu (gate) perbatasan Jagoi Babang sebagai elemen penting sekaligus identitas sebuah perbatasan antarnegara. Sementara untuk status sendiri masih PLB (Pos Lintas Batas) agar menjadi PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas), karena dengan perubahan status tersebut diharapkan mampu memperketat keluar/masuknya manusia dan barang.
2. Dalam hal infrastruktur khususnya jalan raya tetap diprioritaskan, karena jalan rayalah menjadi akses pembuka mobilitas pergerakan dari satu tempat ketempat lainnya, baik atau buruknya kondisi jalan raya tentu akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Sedangkan infrastruktur lainnya adalah transportasi, bus Damri dirasa paling layak untuk dikembangkan diperbatasan Jagoi Babang karena jaraknya lebih dekat dengan Kuching adalah ibukota Sarawak Malaysia jika dibandingkan dengan PLB lain yang sudah dibuka serta akan memudahkan jika hendak berpergian ke wilayah Sarawak atau sebaliknya wisatawan asal mereka (Sarawak)

mengunjungi daerah kita, tentunya dengan menjual berbagai ciri khas budaya yang ada di daerah masing-masing khususnya untuk perbatasan Jagoi Babang sendiri terkenal dengan anyaman Bidai dari daun pandan dan rotan.

3. Kian maraknya produk-produk impor asal Malaysia di hampir semua wilayah KalBar juga merupakan tantangan kepada pihak terkait untuk mengatasinya. Jika dilihat dari sisi pintu perbatasan KalBar yang mempunyai lima pintu perbatasan tidak dapat dipungkiri lagi akan rawan terjadinya penggelapan barang. Ditambah masyarakat kita sendiri juga lebih menyukai produk-produk asal negeri jiran tersebut yang jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan produk dalam Negeri. Salah satu contoh adalah gula, jika dibandingkan dari segi bentuk, gula Malaysia lebih halus dibanding gula kita, kemudian rasa manisnya juga jauh lebih manis dibanding gula kita. Meskipun pemerintah telah menetapkan gula asal Malaysia adalah illegal tetapi pada prakteknya masih banyak kita jumpai dilapangan.
4. Tidak diketahui secara pasti kenapa banyak pos-pos yang telah dibangun di kawasan perbatasan Jagoi Babang kosong atau tanpa ada aktivitas, tetapi yang jelas pembangunan pos-pos tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang matang. Seharusnya pemerintah sebagai pengambil keputusan harus memikirkan terlebih dahulu seberapa jauh pentingnya pos-pos tersebut berjalan, karena mengingat pintu (gate) perbatasannya sendiri masih dalam tahap pengerjaan. Kemudian untuk pos Bea dan Cukai, terlihat tampak ada petugas walaupun tidak kegiatan berarti, mereka hanya duduk dan ngobrol dengan petugas lainnya. Pada saat peneliti ingin mendapatkan data mengenai barang-barang apa saja yang telah dilakukan penyelidikan atau seperti apa barang yang legal maupun illegal tersebut di mata Bea dan Cukai, mereka hanya menjawab kontrol barang tidak begitu ketat sedangkan tidak ada petugas yang menginput data-data tersebut.
5. Kesiapan ditempatkannya para petugas di posnya masing-masing adalah poin penting untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri petugas tersebut dalam bekerja. Walau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya paling tidak para petugas tersebut dibekali dengan berbagai kegiatan seperti : seminar, bimbingan teknis, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta saling koordinasi antar pos-pos terjalin dengan baik.
6. Patok batas wilayah adalah yang paling sering dijadikan sengketa antarnegara Malaysia dan

Indonesia, untuk itu jika perbatasan Jagoi Babang tidak ingin seperti kasus-kasus yang terjadi di perbatasan lainnya segera mungkin dilakukan kontrol secara berkala di setiap patok-patok tersebut, karena untuk menghindari pemindahan patok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, wilayah-wilayah perbatasan yang sulit mendapat akses ke ibukota kabupaten, untuk diberikan program khusus agar mereka tidak seperti dianaktirikan oleh pembangunan.

7. Tidak ketatnya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kita mengakibatkan warga asal Malaysia dengan leluasa menggunakan kendaraan mobil melewati wilayah Indonesia tanpa harus melengkapi persyaratan-persyaratan secara formal. Berbeda dengan warga kita jika hendak memasuki wilayah Malaysia saja sudah dipersulit di Pos Askar (Tentara Keamanan Malaysia), begitu juga dengan pos-pos lainnya mereka cukup ketat untuk memeriksa. Serta jarak paling jauh hanya diperbolehkan sekitar  $\pm$  5 Km kalau masuk lagi akan ditangkap.

#### **Daftar Pustaka**

- Badan Informasi Geospasial (BIG). 2012. Peta Rupa Bumi Indonesia. Cibinong. 2012
- Badan Pusat Statistik. 2011. Kecamatan Jagoi Babang Dalam Angka Tahun 2011, BPS Provinsi Kal-Bar. 2011
- \_\_\_\_\_. 2011. Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2011, BPS. Provinsi Kal-bar.. 2012
- \_\_\_\_\_. 2011. Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011, BPS. Provinsi Kal-bar. 2012
- BAPPEDA Kabupaten Bengkayang. 2010. Rencana Tata Ruang Kec. Jagoi Babang, Kalimantan Barat. 2010
- Bulletin Kawasan, 2010, Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara. Bappenas.. 2010
- Bulletin Kawasan, (Membangun Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi) Bappenas.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan, BAPPENAS. Jakarta
- Jonathan Sarwono, Perbedaan Dasar Antara Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.
- Majalah Bertindak untuk Rakyat. 2011. Membangun Desa Perbatasan Melalui PNPM Mandiri
- Husnadi. 2006. Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus : Kecamatan Paloh dan Saringan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat).
- Dendy Kurniadi. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Negara Dengan Memacu Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kecamatan Entikong Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat).
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2010, Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- BAPPENAS. Profil Provinsi Kalimantan Barat, Kawasan Perbatasan Republik Indonesia. Bappenas. Jakarta
- Tabloid Diplomasi, 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara.